



PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI**

Jl. Pendidikan No. 2 Kota Mataram
bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id
(0370) 750 5330



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024.

Laporan kinerja ini merupakan laporan pertama dari periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Kedepannya, diharapkan penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 sehingga target-target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat tercapai.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (feed back) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang baik "Good Governance" di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Gambaran Umum Pelayanan Bakesbangpoldagri 2

 1.3. Aspek Strategis..... 3

 1.4. Isu Strategis 3

 1.5. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi 4

 1.6. Kepegawaian 5

 1.7. Pengelolaan Aset 6

 1.8. Kendala Pelaksanaan Tugas 8

 1.9. Sistematika Penyajian 8

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 9

 2.1. Rencana Strategis Pembangunan Daerah..... 9

 2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029..... 14

 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 17

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 19

 3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja..... 19

 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja..... 20

 3.3 Capaian Kinerja Bakesbangpoldagri Tahun 2024 21

BAB 4 PENUTUP 44

 4.1 Kesimpulan..... 44

 4.2 Saran 44

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Kesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024- 2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesbangpol tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang demokratis, tentram, aman dan damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani visi, misi, tujuan dan sasaran yang secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontijensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kemajuan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan pencapaian target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Cakupan potensi konflik sosial yang dapat di cegah dan persentase masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah, adalah dua indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB yang cukup menonjol pencapaiannya. Berdasarkan hasil rekapan terakhir Desember 2024, bahwa Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial sebesar 3,8 % dari target **3,0 %**. Padahal sesungguhnya kalau dilihat dari potensi konflik yang terjadi selama tahun 2024 masih cukup tinggi yaitu mencapai 208 kasus. Akan tetapi kondisi ini cepat terdeteksi dan cepat diambil tindakan pencegahannya sehingga kemunculan potensi konflik sosial yang lebih besar dapat

ditekan. Sampai dengan akhir tahun anggaran, konflik sosial yang terjadi di NTB tercatat ada 8 (delapan) kasus, dimana seluruh dari 8 (delapan Kasus) tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan bekerjasama dengan mitra kerja Kesbangpoldagri yaitu Bale Mediasi dan mitra kerja lainnya.

Indikator Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah, dengan target 0,75 % realisasi 0,83 % sehingga capaian target yang dicapai adalah sebesar 1,10 %.

Apabila dilihat dari rata-rata capaian, maka capaian indikator kinerja Bakesbangpoldagri relatif masih cukup tinggi yaitu rata-rata capaian 105 %. Capaian Indikator sasaran Eselon II "Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial" dan Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah, keberhasilan pencapaiannya sangat didukung oleh capaian indikator Eselon III dibawahnya yang walaupun program dan kegiatannya tidak bisa terlaksana dengan optimal di tahun 2024 dikarenakan penetapan anggaran perubahan di pemerintah daerah dilakukan diakhir Tahun Anggaran. Tetapi karena koordinasi dan komunikasi yang intens dengan seluruh *stakeholder* yang ada di seluruh Kabupaten/Kota sehingga Indikator sasaran bisa tercapai walaupun tidak maksimal. Indikator-indikator yang dimaksud yaitu Cakupan mediasi konflik pada daerah rawan konflik, Persentase penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik. Kolaborasi dan saling bersinerginya program dan kegiatan untuk pencapaian seluruh indikator eselon III ini menghantarkan keberhasilan pencapaian indikator Eselon II diatasnya.

Berdasarkan data dan analisis yang disajikan dalam laporan kinerja ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan 2 (dua) tujuan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu *Pertama* ; Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan masyarakat ; *Kedua* : Terwujudnya kesadaran politik masyarakat;
2. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya sasaran
 - *Pertama adalah* Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - *Kedua* ; Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat;
3. Berdasarkan hasil analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target (>100%) yaitu Persentase Keberhasilan Deteksi Dini & Cegah Dini Potensi Konflik Sosial dengan target 3,0 % dan realisasi 3,8 % dengan capaian target 1,2 % dan Persentase masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah dengan target 0,10 % dan realisasi 0,134 % dengan tingkat capaian target 134%. Kemudian, terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan indikator Cakupan Potensi Konflik yang dapat dicegah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, capaian target 100 % serta indikator Persentase Keterlibatan masyarakat dalam politik dengan target 0,75 % dan realisasi 0,83 %. Pencapaian ini meningkat dari tahun sebelumnya karena didukung oleh adanya pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 ini.
4. Rata-rata capaian indikator kinerja 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 sebesar 94,40 %, dengan kata lain capaian indikator kinerja dikategorikan **sangat baik** ($\geq 85\%$).

5. Anggaran program yang menunjang pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis dan 2 (Dua) indikator kinerja adalah sebesar Rp. **174.992.246.483**, direalisasikan sebesar **Rp. 173.037.820.936**. (98,8 %) dengan realisasi fisik 100%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran 1,2 % atau secara absolute sebesar Rp. 1.954.425.547,-.
6. Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
 - a. Meningkatkan komitmen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
 - b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat tercapai.
 - c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government.

Dengan memahami peluang, potensi dan keunggulan yang dimiliki berdasarkan pengalaman selama ini, maka target-target kinerja Bakesbangpoldagri pada akhir periode 2024-2026 dapat dicapai meskipun pada tahun 2024 ini masih berkuat dengan pengetatan anggaran sebagai akibat dari dampak persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Serentak.

Mataram, Maret 2024
KEPALA BADAN BAKESBANGPOLDAGRIDAGRI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ruslan Abdul Gani

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651231 199303 1 135

BAB I

PENDAHULUAN

1.9. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB adalah salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terciptanya kondisi daerah yang aman, tentram, harmonis, dan damai melalui peningkatan pemahaman nilai sosial budaya, toleransi masyarakat, dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi NTB untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Potensi konflik dan kerawanan sosialancam instabilitas
2. Prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
3. Optimalisasi implementasi makna wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan masyarakat
4. Optimalisasi peran Ormas dan Parpol dalam pembangunan
5. Ketersediaan sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

kesbangpol

Untuk menjawab isu-isu dimaksud pada dasarnya di TA. 2024 telah ditindaklanjuti dengan beberapa program dan kegiatan.

Beberapa program dan kegiatan dimaksud antara lain :

1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, Implementasi dari Program ini dimaksudkan untuk menjawab dan menindaklanjuti Isu Strategis No (3) yaitu Optimalisasi implementasi makna wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan masyarakat
2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK. Implementasi dari Program ini dimaksudkan untuk menjawab isu strategis No. (4) yaitu Optimalisasi peran Ormas dan Parpol dalam pembangunan.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Implementasi dari Program ini dimaksudkan untuk menjawab isu strategis No. (4) yaitu Optimalisasi peran Ormas dan Parpol dalam pembangunan
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Implementasi dari Program ini dimaksudkan untuk menjawab isu strategis No. (2) yaitu Prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Implementasi dari Program ini dimaksudkan untuk menjawab isu strategis No. (1) yaitu Potensi konflik dan kerawanan sosialancam instabilitas

Walaupun secara keseluruhan program dan kegiatan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan maksimal, akan tetapi karena koordinasi yang intensif baik dengan OPD dan Instansi terkait di lintas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan juga dukungan semakin tingginya tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya hidup rukun dan damai dalam berbangsa dan bernegara, sehingga mampu menghantarkan kondisi masyarakat NTB tidak semakin terpuruk pada kondisi Pandemi tersebut.

1.9. Gambaran Umum Pelayanan Bakesbangpoldagri

1.2.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pergub NTB No. 49 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah provinsi.

1.2.2. Fungsi.

Bakesbangpoldagri Provinsi NTB melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

1.9. Aspek Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara stabilitas politik dalam negeri. Aspek strategis yang menjadi fokus utama Bakesbangpoldagri meliputi:

1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama: Bakesbangpoldagri berperan dalam memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dan mencegah konflik berbasis SARA.
2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan: Melalui program pendidikan dan sosialisasi, Bakesbangpoldagri berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan, sehingga tercipta masyarakat yang berwawasan luas dan nasionalis.
3. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat: Bakesbangpoldagri bertugas meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam proses demokrasi.
4. Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan: Dengan memperhatikan aspek kemajemukan masyarakat, Bakesbangpoldagri berupaya menjaga stabilitas dan ketahanan di berbagai bidang untuk mencegah potensi konflik.
5. Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan: Bakesbangpoldagri melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan untuk memastikan peran serta mereka dalam pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan dan mendukung stabilitas nasional.

Dengan menjalankan aspek-aspek strategis tersebut, Bakesbangpoldagri berkontribusi signifikan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis, stabil, dan demokratis.

1.9. Isu Strategis

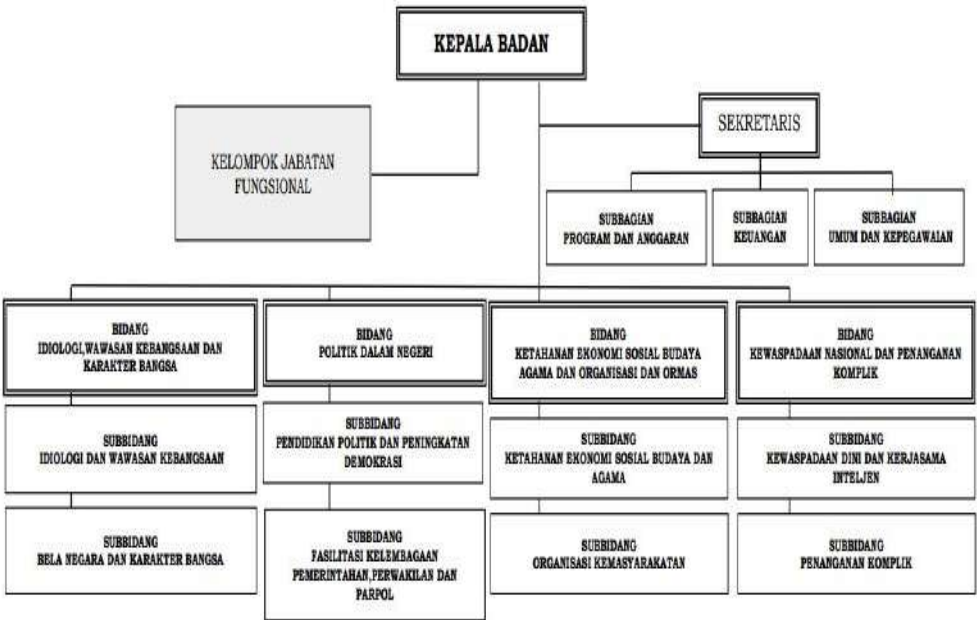
Adapun beberapa isu strategis yang menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain:

1. Potensi konflik dan kerawanan sosial masih marak terjadi dalam masyarakat
2. Prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih cukup tinggi
3. Mulai terkikisnya rasa nasionalisme dan krisis kebangsaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa;
4. Partisipasi aktif Ormas/LSM dan partai politik dalam pembangunan;
5. Ketersediaan sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kesbangpol
6. Penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan.

1.9. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

Untuk menunjang Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam kegiatan pembangunan maka penataan susunan organisasi berdasarkan Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pergub NTB No. 49 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah “Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi”. Bakesbangpoldagri Provinsi NTB melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Gambar 1-1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB



- Keterangan:
- 1. Kepala Badan
 - 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Idiologi,Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - 4. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol.
 - 5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama.
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- 6. Bidang Pengawasan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen.
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sampai saat ini jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya terdapat 2 (Dua) orang fungsional tertentu pertama (Pranata Komputer).

1.7. Kepegawaian

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB dihitung sampai 31 Desember 2021 berjumlah 47 orang. Kondisi kepegawaian ditinjau dari beberapa segi yaitu segi pendidikan, kepangkatan, golongan dan jabatan.

1.6.1. Tingkat Pendidikan

Kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat Pendidikan dapat diuraikan berdasarkan Table 1.1 dibawah ini.

| NO. | Uraian | Tahun 2018 (Orang) | Tahun 2019 (Orang) | Tahun 2020 (Orang) | Tahun 2021 (Orang) |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Pendidikan Doktoral / S-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pendidikan Pasca Sarjana / S-2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 3. | Pendidikan Saraja / S-1 | 27 | 27 | 29 | 29 |
| 4. | Pendidikan Diploma / D.IV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pendidikan Diploma / D.III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pendidikan Diploma / D.I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pendidikan SMK | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8. | Pendidikan SMA | 17 | 16 | 12 | 11 |
| 9. | Pendidikan SMPK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pendidikan SMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SD | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 12. | Jumlah | 52 | 49 | 50 | 47 |

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari total pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB sebanyak 47 orang didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 29 orang (61,70%), SMA 11 orang (23,40%), SMK 4 orang (8,51%) kemudian disusul dengan pegawai dengan Pendidikan S2 sebanyak 2 orang (4,26%) dan SD sebanyak 1 orang (2,13%). Apabila dilihat dari persentase tingkat Pendidikan maka keberadaan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB sudah menunjukkan tingkat pengetahuan teknis dan keterampilan yang memadai.

1.6.2. Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Bada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB berdasarkan pangkat dan golongan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB dirinci berdasarkan pangkat dan golongan

| No. | Uraian | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
|-----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Pembina Utama Madya (IV/d) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Pembina Tk.I (IV/b) | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 4. | Pembina (IV/a) | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Penata Tk.I (III/d) | 12 | 12 | 17 | 13 |
| 6. | Penata (III/c) | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 7. | Penata Muda Tk.I (III/b) | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Penata Muda (III/a) | 6 | 6 | 9 | 4 |
| 9. | Pengatur Tk.I (II/d) | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 10. | Pengatur (II/c) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11. | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 12. | Pengatur Muda (II/a) | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Juru Tk.I (I/d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Juru (I/c) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Juru MudaTk.I (I/b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Juru Muda (I/a) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Jumlah | 52 | 49 | 51 | 47 |

Dari Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa kondisi kepangkatan dan golongan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB tahun 2024 dan di dominasi oleh golongan III/d. Dari segi kepangkatan terlihat bahwa sebagian besar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB ada pada Golongan III.

1.6.3. Jabatan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB berdasarkan eselonisasi dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah pegawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dirinci berdasarkan jabatan

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|-----------------------------|------|------|------|------|
| 1. | Eselon II | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Eselon III | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 3. | Eselon IV | 8 | 9 | 9 | 11 |
| 4. | Jabatan Fungsional Umum | 36 | 31 | 34 | 32 |
| 5. | Jabatan Fungsional Tertentu | 4 | 4 | 3 | 2 |
| | Jumlah | 52 | 49 | 51 | 47 |

1.7. Pengelolaan Aset

Daftar Asset pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB yang tercatat di Tahun 2024 dapat dilihat pada table 1.4. dibawah ini:

| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | |
|------------|---------------------------------|--------|---------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat |
| I. | PRASARANA | | | | |
| 1. | Tanah Bangunan | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Bangunan Gedung Kantor | 1 | 1 | - | - |
| II. | SARANA | | | | |
| 1. | Station Wagon | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Mini Bus | 7 | 7 | - | - |
| 3. | Pick Up | 1 | 1 | - | - |
| 4. | Sepeda Motor | 29 | 22 | 1 | 6 |
| 5. | Sepeda | 2 | - | - | 2 |
| 6. | Mesin Ketik Manual | 3 | 1 | 2 | - |
| 7. | Mesin Absen | 1 | 1 | - | - |
| 8. | Rak Kayu | 14 | 10 | 4 | - |
| 9. | Filling Besi | 5 | 2 | 3 | - |
| 10. | Filling Kayu | 8 | - | 8 | - |
| 11. | Brand Kas | 4 | 4 | - | - |
| 12. | Lemari Kayu | 9 | 6 | 3 | - |
| 13. | Papan Pengumuman | 14 | 14 | - | - |
| 14. | White Board | 2 | 2 | - | - |
| 15. | Display | 2 | 1 | 1 | |
| 16. | Meja Rapat | 18 | 18 | - | - |
| 17. | Meja Telpn | 3 | 3 | - | - |
| 18. | Meja Tik | 1 | 1 | - | - |
| 19. | Kursi Tamu | 2 | 2 | - | - |
| 20. | Kursi Tangan | 11 | 8 | 3 | - |
| 21. | Kursi Putar | 5 | 2 | 3 | - |
| 22. | Kursi Biasa | 26 | 16 | 10 | - |
| 23. | Bangku Tunggu | 1 | 1 | - | - |
| 24. | Kursi Lipat | 125 | 122 | 3 | - |
| 25. | Meja Biro | 1 | 1 | - | - |
| 26. | Jam Elektronik | 6 | 6 | - | - |
| 27. | Mesin Penghisap Debu | 1 | 1 | - | - |
| 28. | Mesin Pemotong Rumput | 1 | 1 | - | - |
| 29. | Lemari Es | 2 | 2 | - | - |
| 30. | AC Unit | 15 | 15 | - | - |
| 31. | Kipas Angin | 3 | 3 | - | - |
| 32. | Radio | 1 | - | 1 | - |
| 33. | Televisi | 5 | 5 | - | - |
| 34. | Mic Wireless | 1 | 1 | - | - |
| 35. | Camera Video | 1 | 1 | - | - |
| 36. | Lambang Garuda Pancasila | 2 | 2 | - | - |
| 37. | Tangga Aluminium | 1 | 1 | - | - |
| 38. | Kaca Hias | 2 | 2 | - | - |
| 39. | Dispenser | 4 | 4 | - | - |
| 40. | Mimbar/ Podium | 1 | - | 1 | - |
| 41. | Handy Cam | 4 | 4 | - | - |
| 42. | Alat Pembantu Pemadam Kebakaran | 2 | 2 | - | - |
| 43. | PC Unit | 4 | 4 | - | - |
| 44. | Laptop | 5 | 4 | 1 | - |
| 45. | Note Book | 5 | 4 | 1 | |
| 46. | Personal Komputer Lain-lain | 9 | 9 | - | - |
| 47. | CPU | 1 | - | 1 | - |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----|----|---|---|
| 48. | Perlatan Komputer Mainframe Lain-Lain | 4 | 4 | - | - |
| 49. | Printer | 16 | 15 | 1 | - |
| 50. | UPS | 1 | - | 1 | - |
| 51. | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 57 | 49 | 8 | |
| 52. | Meja Tamu Ruangannya Biasa | 6 | 5 | 1 | - |
| 53. | Buffet Kayu | 2 | - | 2 | - |
| 54. | Camera | 5 | 5 | - | - |
| 55. | Microphone Floor Stand | 4 | 1 | 3 | - |
| 56. | UPS | 1 | 1 | - | - |
| 57. | Sound System | 1 | 1 | - | - |
| 58. | Pesawat Telephone | 2 | 2 | - | - |
| 59. | Handy Talky | 3 | 3 | - | - |
| 60. | Faximilie | 1 | 1 | - | - |
| 61. | Gambar Presiden | 2 | 2 | - | - |
| 62. | Gambar Wakil Presiden | 2 | 2 | - | - |

Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana Bakesbangpodagri Tahun 2024.

1.9. Kendala Pelaksanaan Tugas

Bakesbangpoldagri Provinsi NTB merupakan salah satu OPD yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah dan sebagai mata dan telinganya Pemerintah memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mempertahankan kondusifitas daerah guna keberlangsungan pembangunan di segala sektor. Oleh karena itu harus di tunjang dengan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai.

Meskipun target indikator kinerja dapat dicapai, namun tidak berarti lepas dari berbagai kendala atau permasalahan. Kendala yang cukup dirasakan adalah masih minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Bakesbangpoldagri Provinsi NTB baik dari secara kuantitas maupun kualitas. Secara kualitas sebagian besar para pejabat struktural yang ditempatkan pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, tidak didasarkan pada pertimbangan latar belakang pendidikan dan pengalaman, jabatan yang berkesesuaian dengan kompetensi yang diperlukan pada jabatan serta minimnya aparat yang mengikuti diklat teknis yang diperlukan seperti diklat intelejen. Sedangkan secara kuantitas jumlah PNS yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan tupoksi pada Bakesbangpoldagri sebanyak 58 orang, namun yang tersedia hanya 47 orang.

1.9. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menunjukkan pencapaian kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*peformance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian LKjIP tahun 2024 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum tentang tugas pokok dan fungsi organisasi dalam hal ini Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan penekanan pada aspek strategi organissi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dalam kurun waktu Tahun 2021.

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang:

- A. Capaian Kinerja Organisasi, menjelaskan capaian kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya.
- B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh atas capaian kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB serta langkah di masa mendatang yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Daerah

Tahun 2023 Provinsi NTB termasuk salah satu provinsi yang masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernurnya berakhir pada tanggal 19 September 2023. Oleh karena itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; Pemerintah Provinsi NTB berkewajiban menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi yang disusun karena RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 berakhir masa pelaksanaannya pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional, sehingga setelah tanggal 19 September 2023 Provinsi NTB akan dipimpin oleh Penjabat Gubernur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional. Dengan demikian RPD Provinsi NTB Tahun 2024- 2026 menjadi pedoman dalam mengarahkan dan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2024-2026.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk menyesuaikan indikator dan target Rencana Pembangunan Daerah (2024-2026).

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2026.

2.1.2. Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Namun pada

periode ini, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi NTB merumuskan konsep RPD 2024- 2026 sebagai acuan setiap OPD dalam menyusun Renstra dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1. 5 Misi RPJPD Provinsi NTB 2005-2025
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
3. 6 Misi RPJMD Provinsi NTB 2018-2023
4. 7 Isu-isu strategis 2024-2026
5. Isu global, regional, dan lokal yang berkembang di daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan yang mengacu pada berbagai dokumen perencanaan tersebut serta berbagai isu aktual yang dihadapi teridentifikasi 6 dimensi pembangunan yang menjadi isu utama yang perlu diatasi dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024-2026. Dengan demikian fokus perencanaan pembangunan daerah pada periode 2024-2026 terdiri atas 3 pilar utama dan 3 pilar pendukung. Tiga pilar utama yaitu dimensi pembangunan manusia (People), dimensi pembangunan lingkungan (Planet) dan Dimensi Pembangunan kesejahteraan (Prosperity). Selanjutnya tiga pilar pendukung meliputi dimensi tata kelola (governance), dimensi pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan dimensi daya saing daerah (Competitiveness). Keenam dimensi tersebut menjadi dasar perumusan kerangka logis RPD ini yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mendukung pencapaian tujuan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka telah ditetapkan fokus perencanaan pembangunan yang diemban Bakesbangpoldagri Provinsi NTB adalah pada Dimensi ke-3 yaitu "Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri.

Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Pilar 3 Prosperity dengan Tujuan dan Sasaran :

A. Tujuan :

- 1. Terwujudnya kualitas demokrasi di Nusa Tenggara Barat
- 2. Terwujudnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan.

B. Sasaran :

- 1. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.
- 2. Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan dalam RPD 2024 – 2026 , dimana Bakesbangpoldagri Provinsi NTB mengemban tugas untuk mendukung pilar ke-3 Prosperity serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tahun 2024 – 2026 sesuai dengan bidang kesatuan bangsa yaitu:

- 1. Terwujudnya kesadaran politik masyarakat.
- 2. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Sedangkan sasaran yang ingin di capai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tahun 2024 – 2026 dan merupakan penjabaran dari tujuan itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.
- 2. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Adapun tujuan, sasaran, serta target indicator kinerja yang ingin di capai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tahun 2024 – 2026 tersaji pada tabel 2-1.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun (%) | | | | | Formula |
|-----|--|---|---|---|------|------|--|--|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 1. | Terwujudnya pemahaman nilai sosial, budaya dan toleransi masyarakat. | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | Cakupan potensi konflik yang dapat dicegah | 3,00 | 3,50 | 4.00 | | | (Jumlah potensi konflik yang dapat dicegah / jumlah potensi konflik) x 100 |
| | | | Presentase keberhasilan deteksi dini & cegah dini potensi konflik sosial | 100 | 100 | 100 | | | (Konflik Sosial - Konflik yang muncul Kembali / Konflik Sosial) x 100% |
| 2. | Terwujudnya kesadaran politik masyarakat | Meningkatnya masyarakat sadar politik | Persentase keterlibatan masyarakat dalam politik | 0,75 | 0,80 | 0,85 | | | (Jumlah masyarakat yang terlibat dalam Organisasi Politik + Ormas / Jumlah masyarakat usia 20-59 tahun) x 100% |
| | | | Persentase masyarakat yang mendapat Pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah | 1,8 | 2.0 | 2.0 | | | (Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik / Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih) x 100 |

2.1.4. Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi enam RPJMD 2019-2023 yaitu " Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan". Sasaran dari misi tersebut adalah Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat dan Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1..1.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan;
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.

1..1.2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;

1..1.3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial

Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

1..1.4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

1..1.5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan serta Penanganan Konflik di daerah;
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan serta Penanganan Konflik di daerah;
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kewaspadaan dini, Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kelembagaan serta Penanganan Konflik di daerah;
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Pendidikan Politik Dalam Negeri Tahun 2024

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target (%) |
|-----|--|---|--|------------|
| 1. | Terwujudnya pemahaman nilai sosial, budaya dan toleransi masyarakat. | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase Penanganan Konflik SARA | 100 |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat Yang mengikuti Pendidikan Karakter Bangsa | 25 |
| | | | Cakupan Mediator Bale Mediasi Yang dilatih | 5,11 |
| 2. | Terwujudnya kesadaran politik masyarakat | Meningkatnya masyarakat sadar politik | Indeks Demokrasi | 77,47 |

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Daerah pada RPD Provinsi NTB 2024-2026

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | | | | | Formula |
|-----|--|---|-----------------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|
| | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | | |
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Partisipasi Politik Masyarakat | 84,57 | 84,57 | 84,85 | 82,85 | | 83,74 | | | | | | Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih/ Jumlah DPT x 100% |
| 2. | Persentase Kelompok Masyarakat Yang mengikuti Pendidikan Karakter Bangsa | 0,10 | 0,10 | 0,13 (8 komunitas) | 0,11 | - | 0,12 | - | | | | | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Karakter Bangsa/ Jumlah Kelompok Masyarakat X 100 |
| 3 | Persentase penurunan konflik sosial | 100 | 100 | 100 0 kasus | 100 | | 100 | | | | | | (jumlah konflik yang terjadi sebelumnya – jumlah konflik tahun ini / jumlah konflik tahun sebelumnya) * 100 |
| 4 | Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik | 0,74 | 0,75 | - | 0,80 | | 0,85 | | | | | | (jumlah masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan Parpol + Ormas / jumlah masyarakat usia 25 – 59 thn) * 100 |
| 5 | Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih (%) | 5 | 5,11 | 5,10 | 5,33 | - | 5,55 | - | | | | | (jumlah mediator yg dilatih tahun N/ jumlah mediator di desa tahun N - total mediator yang sudah dilatih tahun sebelumnya) * 100 |

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Kesadaran Politik masyarakat | Persentase keterlibatan masyarakat dalam politik | 0,75% |
| 2. | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial | 3,0% |

Dari perjanjian inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh Aparatur Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dari level eselon II hingga ke staf yang disesuaikan dengan masing-masing tugas dan fungsi yang diemban.

Tabel 2.5 Anggaran Program Kegiatan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2024

| No. | Program | Anggaran (Rp.) |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Program Ideologi Penguatan Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 750.305.412,- |
| 2. | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta BUdaya Politik | 160.007.024.455,- |
| 3. | Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | 1.767.314.000,- |
| 4. | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya | 707.740.000,- |
| 5. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 3.910.560.000,- |

Pada tabel 2.5 menggambarkan pagu anggaran untuk membiayai program kegiatan Bakesbangpoldari tahun anggaran 2024. Kondisi pada tahun 2024 sedikit

lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 dimana ditahun itu masih merupakan masa atau tahap pemulihan dari pandemi Covid-19 yang mewabah sejak 2020 yang lalu sehingga Pemerintah Daerah mengambil kebijakan *Refocusing* anggaran untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2.6 Anggaran Sasaran Strategis Bakesbangpoldagri Provinsi NTB
Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp.) |
|-------------|---|-------------------|
| 1. | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | 5.368.605.412,- |
| 2. | Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat | 161.774.338.455,- |
| J U M L A H | | 167.142.943.867,- |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pada laporan kinerja ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
 Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
 Tahun 2024

| No | Klasifikasi Penilaian | Predikat |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | 85% - 100% | Sangat Baik |
| 2 | 69% - 84% | Baik |
| 3 | 53% - 68% | Cukup |
| 4 | < 53% | Gagal |

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Dari 2 (Dua) Tujuan dan 2 (Dua) sasaran strategis tersebut, ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 4 (Empat) indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja 2 (dua) tujuan Tahun 2024 adalah sebesar **105 %** dengan rincian :

1. **Cakupan Potensi Konflik yang dapat Dicegah** target 100 % dengan realisasi 100 % dan capaian 100 %. Angka tersebut didapat dari jumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun 2024 sebanyak 798 kasus. Dari 798 kasus tersebut yang berpotensi muncul menjadi konflik adalah sebanyak 208 kasus. Namun dengan upaya yang maksimal melalui berbagai kegiatan yang ada di Bakesbangpoldagri seperti kegiatan penyusupan dan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik, jumlah potensi-potensi konflik tersebut dapat ditekan meskipun kemudian ada 8 kasus yang muncul sebagai konflik. Dan Konflik Sosial yang muncul ke permukaan sebanyak 8 kasus tersebut kesemuanya dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Bale mediasi bekerja sama dengan mitra kerja Bakesbangpoldagri lainnya.
2. **Persentase keterlibatan masyarakat dalam politik** target 0,75 % realisasi 0,83 % dengan capaian 110 %. Angka tersebut didapat dari 18.598 orang masyarakat NTB yang terlibat langsung dalam Kepengurusan Organisasi atau sebesar 0,83% dari 2,250.759 jiwa penduduk NTB usia 25 – 59 tahun sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tujuan Badan Kesbangpoldagri NTB Tahun 202

| No. | Tujuan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|--|---------|-----------|---------|
| 1. | Terwujudnya pemahaman nilai sosial budaya dan toleransi masyarakat | Persentase Potensi Konflik yang dapat dicegah | 98,86 % | 66 % | 88 % |
| 2. | Terwujudnya kesadaran politik masyarakat | Persentase keterlibatan masyarakat dalam politik | 1.0 % | 1,26 % | 126 % |

Adapun rata-rata capaian target indikator kinerja 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 adalah **126 %**. Dari 2 (Dua) indikator kinerja, capaiannya melebihi target yaitu persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah sebesar 0,83 %. Hasil pengukuran kinerja pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesbangpoldagri NTB Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial | 3,0 % | 3,0 % | 100 % |
| 2. | Meningkatnya masyarakat sadar politik | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah | 0,75 % | 0,83 % | 105 % |

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu Dua sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai **“Sangat Baik”** dengan nilai 100 % untuk sasaran 1,05 % untuk sasaran 2.

Capaian yang diperoleh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat ini harus dipertahankan dan bahkan harus terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai inovasi dan langkah-langkah konkrit untuk terus menjamin kondisi aman dan nyaman di wilayah Nusa Tenggara Barat.

3.3 CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOLDAGRI TAHUN 2024

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang

diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Berikut ini dapat dijelaskan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja per sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran Strategis I: Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Barat khususnya, memiliki keanekaragaman baik dilihat dari suku bangsa, ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di daerah, jika ada ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial- ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Dinamika sosial yang diiringi oleh konflik dengan kekerasan berlangsung dalam beraneka rupa bentuk dan menyebar hampir di segala aspek kehidupan masyarakat, akibatnya akan selalu sama yaitu mengganggu integrasi sosial. Konflik tersebut telah mengakibatkan terganggunya rasa aman sehingga menimbulkan rasa takut masyarakat, terjadinya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan bahkan korban jiwa dan trauma psikologis pada gilirannya dapat menghambat usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merubah image bahwa wilayah Provinsi NTB yang tidak kondusif dan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara mendapatkan rasa aman dan nyaman, maka Bakesbangpol Dagri Provinsi. NTB menetapkan **“Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan”** sebagai salah satu **sasaran** yang ingin dicapai dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang kehidupan. Dan untuk mengukur pencapaian Sasaran tersebut dapat dilihat pada pencapaian indikator sebagai berikut :

Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial

Untuk mengukur Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{konflik sosial} - \sum \text{konflik sosial yang muncul Kembali}}{\sum \text{konflik sosial}} \times 100\%$$

Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial, merupakan suatu parameter yang menggambarkan kemampuan menggagalkan atau meredam gejala dalam masyarakat melalui upaya mengetahui lebih awal permasalahan dalam masyarakat guna ditetapkan langkah pencegahan yang tepat supaya tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih besar.

Penekanan dari indikator Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial yang dimaksud disini yaitu keberhasilan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial yang sudah terjadi untuk tidak muncul kembali menjadi konflik sosial baru pada tahun yang sama atau tahun berjalan.

Beberapa istilah terkait formulasi indikator tersebut :

1. **Deteksi dini dan cegah dini** merupakan salah satu paket kinerja kunci dalam menangkal ataupun menggagalkan timbulnya konflik sosial di masyarakat. Langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui lebih awal berbagai potensi yang bisa menimbulkan kerawanan, gangguan dan bahaya yang sewaktu-waktu meledak dalam segala bentuk yang mengganggu keamanan sosial, politik, persatuan dan kesatuan. Pentingnya deteksi dini supaya lebih awal mengetahui permasalahan di dalam masyarakat yang bisa melahirkan gejolak, supaya bisa diambil tindakan yang tepat untuk mencegahnya.
2. **Konflik sosial**
Konflik sosial yang dimaksud dalam uraian ini adalah konflik sosial sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang berdampak luas dan mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas Nasional dan menghambat pembangunan Nasional.
3. **Potensi Konflik Sosial**
Potensi Konflik Sosial adalah segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gejolak, mengganggu keamanan, sosial, politik, persatuan dan kesatuan. Potensi konflik apabila tidak dilakukan pencehagan dn penangan yang tepat akan melahirkan konflik sosial yang lebih besar.
4. **Konflik Sosial yang muncul kembali**
Konflik Sosial yang muncul kembali adalah konflik sosial yang sudah dilakukan penanganan secara sistematis pada saat terjadinya konflik maupun pasca konflik namun dalam kurun waktu tahun berjalan kembali meledak dan muncul sebagai konflik sosial.

Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Persentase Tingkat Capaian |
|--|--------------|---------------|----------------------------|
| Persentase keberhasilan cegah dini dan deteksi dini konflik sosial | 3,0 % | 3,04 % | 100 % |

Dari Tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa dari target 3,0 % dan Realisasi 3,04 % tingkat pencapaian mencapai 100 %. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori **“sangat baik”**.

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konflik di NTB Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dijelaskan pada tabel 3. berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Renstra Bakesbangpoldagri 2024 – 2026

| No. | Indikator kinerja | Tahun 2023 (%) | | % capaian | Tahun 2024 (%) | | % capaian | Tahun 2025 (%) | | % Capaian | Tahun 2026 (%) | |
|-----|-------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|-----|-----|--|--|-----|--|
| 1 | Persentase keberhasilan cegah dini dan deteksi dini konflik sosial | 3.00 | 3.00 | 100 | 3.00 | 3,04 | 101 | 3,5 | | | 4,0 | |
|---|--|------|------|-----|------|------|-----|-----|--|--|-----|--|

Memperhatikan realisasi capaian tahun 2024 yang berada diposisi 3,04 % jika dibandingkan dengan target untuk tahun 2024 sebesar 3,00 maka capaian kinerja Bakesbangpoldagri tahun 2024 adalah sebesar 101%. Ini artinya bahwa pencapaian tahun 2024 meskipun berada pada tahun politik yang memungkinkan terjadinya peningkatan potensi konflik namun capaian yang diperoleh melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di Bakesbangpoldagri terjadi peningkatan sebesar 0,04%. Hal ini tentunya didukung oleh stakeholder dan Mitra kerja Bakesbangpoldagri dalam melakukan antisipasi dan deteksi dini konflik sosial, sehingga potensi konflik yang mungkin terjadi di masyarakat dapat diminimalisir seminimal mungkin dan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada 2024 dapat terlaksana dengan sukses, aman dan kondusif.

Dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja pada situasi politik seperti tahun 2024, pencapaian target 101% Bakesbangpoldagri semakin optimis dapat menjaga kondusifitas stabilitas wilayah pada tahun – tahun berikutnya dengan baik. Optimisme ini didukung oleh semakin meningkatnya kedewasaan dan kematangan masyarakat dalam menerima perbedaan politik dan ideologi sehingga target akhir perodesasi Renstra Bakesbangpoldagri 2024 - 2026 optimis akan dapat tercapai.

Pada tahun 2024 potensi konflik sosial yang terjadi di NTB adalah sebanyak 271 kasus. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan total potensi konflik sosial yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 798 kasus atau turun sebanyak 527 kasus (66,0%). Penurunan sebesar 66% ini didominasi oleh kasus ekonomi dan sosial. Potensi konflik yang terjadi di NTB selain di picu oleh kejadian menonjol seperti tindak kriminal, perkelahian juga dibentuk dari kejadian unjuk rasa. Berikut disajikan beberapa potensi konflik atau kasus menonjol yang berpotensi konflik di wilayah NTB.

Tabel 3.6 Potensi Konflik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

| NO | JENIS KASUS | KABUPATEN / KOTA | | | | | | | | | | JUMLAH |
|----|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | Kota Mataram | Kab. Lombok Utara | Kab. Lombok Barat | Kab. Lombok Tengah | Kab. Lombok Timur | Kab. Sumbawa Barat | Kab. Sumbawa | Kab. Dompu | Kab. Bima | Kota Bima | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| 1 | PENGHADANGAN/BLOKIR/SEGEL | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 60 | 2 | 92 |
| 2 | PENGANIAYAAN / PEMBACOKAN | | | 3 | 2 | 1 | | 26 | 2 | 27 | 14 | 75 |
| 3 | PERKELAHIAN WARGA/KAMPUNG | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 4 |
| 4 | PERKELAHIAN PEMUDA | | | | 1 | | | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|----|-----|
| 5 | PERKELAHIAN PELAJAR | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
| 6 | PEMANAHAN | | | | | | | 2 | | 1 | 5 | 8 |
| 7 | PEMBUNUHAN | 1 | | | | | | 1 | | 3 | | 5 |
| 8 | ASUSILA/PEMERKOSAAN/PENCABULAN | | | | | | | 17 | | 4 | 4 | 25 |
| 9 | PENGERUSAKAN | | | | | 1 | | 8 | | 5 | 2 | 16 |
| 10 | PEMBAKARAN | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| 11 | PENYERANGAN | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| 12 | SENGKETA LAHAN | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 4 |
| 13 | KERIBUTAN | | | 1 | | 1 | | 2 | | | 4 | 8 |
| 14 | PENOLAKAN PEMBANGUNAN | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| 15 | KONSENTRASI MASSA | | | | | 2 | | | | 1 | 2 | 5 |
| 16 | PENGUASAAN LAHAN | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | PROVOKASI | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | UJARAN KEBENCIAN | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | KECALAKAAN LALU LINTAS | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | MOGOK KERJA | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | PENISTAAN AGAMA | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | PENEMBAKAN | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 23 | ISU DUKUN SANTET | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| TOTAL | | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 70 | 20 | 112 | 46 | 271 |

Tabel 3.7 Jumlah Kasus di Provinsi NTB Tahun 2024 berdasarkan Latar Belakang Konflik.

| NO | KABUPATEN/KOTA | LATAR BELAKANG | | | | | JUMLAH LAPORAN IPOLEKSOSBUD HANKAM |
|----|-------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|
| | | IDEOLOGI | POLITIK,HUKUM DAN PEMERINTAHAN | EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA | HANKAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | KOTA MATARAM | 1 | 359 | 86 | 82 | 12 | 540 |
| 2 | KABUPATEN LOMBOK UTARA | 0 | 115 | 19 | 42 | 2 | 178 |
| 3 | KABUPATEN LOMBOK BARAT | 1 | 158 | 66 | 56 | 11 | 292 |
| 4 | KABUPATEN LOMBOK TENGAH | 0 | 312 | 79 | 84 | 14 | 489 |
| 5 | KABUPATEN LOMBOK TIMUR | 0 | 143 | 29 | 50 | 3 | 225 |
| 6 | KABUPATEN | 5 | 171 | 25 | 56 | 9 | 266 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|----|------|-----|-----|-----|------|
| | SUMBAWA BARAT | | | | | | |
| 7 | KABUPATEN SUMBAWA | 0 | 291 | 109 | 217 | 73 | 690 |
| 8 | KABUPATEN DOMPU | 3 | 118 | 65 | 29 | 23 | 238 |
| 9 | KABUPATEN BIMA | 11 | 262 | 70 | 96 | 140 | 579 |
| 10 | KOTA BIMA | 11 | 413 | 274 | 133 | 47 | 878 |
| JUMLAH | | 32 | 2342 | 822 | 845 | 334 | 4375 |

Sumber : Komunitas Jejaring Kab/Kota se-NTB

Dari table 3.7 diatas menunjukan bahwa jumlah kasus yang terjadi di Provinsi NTB sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 4375 dan yang berpotensi menjadi konflik sebanyak 271 kasus. Dari 271 kasus konflik yang muncul di lapangan ada 263 kasus dapat diselesaikan ditingkat lapangan berkat kesigapan Tim Jejaring yang tersebar di semua wilayah Kabupaten/Kota melalui Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik, sementara 8 kasus konflik lainnya diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh Bale Mediasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian target Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik telah melewati target yang ditetapkan sebesar 0,04% dan demikian juga dengan tingkat capaian jka dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

Secara keseluruhan kasus konflik sosial yang terjadi pada 2024 tersebut terjadi hampir merata di seluruh kabupaten/Kota di wilayah NTB dan didominasi oleh kasus yang terkait dengan hukum dan pemerintahan sebanyak 2.342 kasus dari 4.375 kasus yang terjadi sepanjang 2024. Untuk kasus dengan latar belakang ekonomi dan pembangunan adalah sebesar 274 kasus dari 4.375 kasus atau sebesar atau sebesar 6,26%. Untuk kasus dengan latar belakang sosial budaya adalah sebesar 133 kasus atau 3,04% dari 4.375 kasus.

Jika dilihat dari capaian kinerja yang terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelum – sebelumnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat potensi konflik di masyarakat masih cukup tinggi. Untuk mengantisipasi hal ini, maka pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya, Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bale Mediasi, dan Jejaring semaksimal mungkin ditengah keterbatasan anggaran yang ada.

Sepanjang tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan rapat tim rapat Timdu PKS sebanyak 2 kali rapat,rapat tim FKUB sebanyak 1 kali rapat, rapat tim FPK sebanyak 2 kali rapat dan rapat Forkopimda sebanyak 12 kali rapat. Tim dan forum-forum strategis ini dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah dan difasilitasi pembentukannya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peran dari tim dan forum-forum strategis ini diantaranya :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah
2. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini
3. Mengkoordinasikan langkah-langkah pengamanan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

4. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Memberikan laporan informasi serta rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Beberapa hal yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial adalah sebagai berikut.

a. Efektifnya Pemanfaatan Sumber Daya

Yaitu dengan mengotimalkan sumber daya yang ada dengan saling bersinergi antar bidang untuk menghasilkan pencapaian target yang maksimal melalui:

- 1) Saling keterkaitan dan saling mendukungnya antara indikator, baik antara indikator eselon II dengan eselon 3, demikian juga antara eselon III dengan eselon IV dibawahnya, sehingga indikator outcome Perangkat Daerah (Eselon II) terdorong dengan baik.

Indikator-indikator Eselon III dimaksud yaitu :

- Cakupan Mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik;
 - Persentase Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada daerah Rawan Konflik;
 - Persentase Desa Bersinar.
- 2) Saling bersinergi dan efektifnya program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang Teknis, yang walaupun dilihat dari sisi anggaran karena pandemic Covid-19 sangat minim dan tidak mendukung, tetapi karena substansi kegiatan bisa saling mengisi satu sama lain maka capaian outcome dari masing-masing program tidak berpengaruh secara signifikan dengan keterbatasan capaian output.

Beberapa Program dan kegiatan yang dimaksud yaitu :

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik, dengan memfungsikan seluruh perangkat-perangkat kegiatan yang ada didalamnya. Sehingga indikator program berupa Cakupan Mediasi pada daerah rawan konflik dengan target 10% realisasi 10% dengan capaian target 100%. Pelaksanaan Kegiatannya berupa hibah kepada Lembaga yang difasilitasi, Honorarium dan Fasilitasi Jejaring Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan, Rapat Koordinasi FKDM, Rapat Koordinasi Tim Terpadu PKS, Rapat Tim Pengawasan Orang Asing dan Bimtek Dasar Intelegen serta Rapat Forkopimda;
- Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator program Persentase Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada daerah rawan konflik. Indikator Pelaksanaan kegiatan berupa Konsolidasi GNRM dan Kader Bela Negara serta Rapat Koordinasi Forum Kemitraan Pembauran.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Budaya dengan icon kegiatannya Desa/kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan salah satu upaya mengurangi munculnya kasus potensi konflik sosial dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Indikator kinerja dari Program ini adalah Persentase Desa Bersih Narkoba dengan target 86,21% realisasi 100 % sehingga capaian target sebesar 115%%. Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan diakhir RPJMD telah terbentuk 50 Desa Bersinar sesuai target jangka menengah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan Rapat Tim Terpadu P4GN serta Koordinasi berupa Rapat Uji Publik Naskah Kampung Madani, Pembekalan Satgas/Mentor Fasilitator P4GN, Rapat Desa Bersinar

b. Efektifnya pola koordinasi

Yaitu koordinasi dengan Perangkat Daerah di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota serta Instansi Vertikal yang ada di daerah yang memiliki keterkaitan Fungsi, seperti:

- Satpol/PP dalam hal penegakan PERDA dan melakukan penertiban sesungguhnya akan mendapatkan perlawanan atau ada yang pro maupun kontra terhadap tindakan yang diambil dan bahkan memicu terjadinya konflik, namun karena mitra Bakesbangpoldagri terutama anggota deteksi dini dan cegah dini, FKDM, Timdu/PKS yang beranggotakan lintas sektor, dll berperan dengan baik maka kekhawatiran adanya gejolak dapat diminimalisir;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes Dukcapil, terkait dengan penyebaran penduduk seperti yang terdapat di Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat, Bakesbangpoldagri berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam rangka mengawal dan menciptakan suasana kondusif di lokasi sebaran, demikian juga dengan program Desa / Kelurahan Bersinar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se- NTB, dll;
- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), POLDA NTB, POLRES Kab/Kota, Kelurahan/Desa terkait dengan pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersinar.

Beberapa sebab yang memicu terjadinya konflik sosial di Provinsi NTB diantaranya:

- Kurangnya intensitas dialog dengan masyarakat terutama pada daerah-daerah yang telah dipetakan rawan terjadinya konflik (Kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun Provinsi).
- Kurang adanya sosok panutan atau ketokohan yang disegani (Kharismatik).
- Menurunnya pemahaman nilai sosial, budaya dan saling tenggang rasa dalam menjaga kerukunan hidup antara warga sebagai dampak arus kemajuan teknologi dan globalisasi
- Terbukanya ruang untuk menyampaikan pendapat dimanfaatkan secara berlebihan oleh masyarakat, tanpa mempertimbangkan dengan matang dampak yang akan timbul
- Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk karena pandemi covid-19, sehingga mudah terprovokasi ke hal-hal yang tidak membangun.
- Keterbukaan Teknologi informasi yang tidak cermat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di media sosial dengan berita-berita Hoaks sehingga mempengaruhi emosi masyarakat
- Topografi dan jangkauan Wilayah kerja yang luas tidak diimbangi dengan sarana dan sumber daya yang memadai.

Terhadap konflik sosial yang terjadi di Provinsi NTB yang dipicu dari hal-hal seperti yang disampaikan di atas, telah dilakukan upaya-upaya :

- Koordinasi dengan seluruh Jejaring Kabupaten/Kota untuk segera siaga di lokasi kejadian dan melakukan tindakan pencegahan agar tidak terulang lagi kejadian yang sama, serta tidak berkembang ke arah yang lebih besar lagi
- Melakukan tindakan penanganan terhadap kasus yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.368.605.412 (Lima milyar tiga ratus Enam puluh Delapan juta Enam Ratus Lima ribu Empat Ratus Dua Belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.287.253.159 (Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua atus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Dengan kata lain, capaian kinerja keuangan sebesar 98 % yang terealisasi dan terdapat 2 % anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 2 % untuk pencapaian sasaran meningkatnya kemandirian dan kenyamanan Lingkungan

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase Keberhasilan Deteksi dini & Cegah Dini potensi konflik sosial | 100% | 97,53% | 97,53% |

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan indikator Persentase keberhasilan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

CAPAIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

A.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | | | | Program/ Kegiatan | ANGGARAN | | | | Penanggung Jawab |
|----|---|---|--------|--------|-----------|--------|--|------------------|------------------|--------|---------|--------------------------|
| | | | | | | | | APBD | | | | |
| | | Uraian | Satuan | Target | Realisasi | % | | Rp. | Realisasi (Rp) | % | Fisik % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan | Persentase keberhasilan deteksi dini & cegah dini potensi konflik | % | 3 | 3 | 100.00 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 3,910,560,000 | 3,887,965,840 | 99.42 | 100 | BADAN KESBANGPOLDAGRINTB |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kasus | 3 | 3.37 | 112.33 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 250,000,000 | 250,000,000 | 100.00 | 100 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1,322,555,000.00 | 1,322,210,840.00 | 99.97 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|------|------|--------|--|---|--------------------|--------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | <p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> | 55,000 | 55,000 | 100.00 | 100 | |
| | | | | | | | | <p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</p> | 2,337,950,000.00 | 2,315,700,000.00 | 99.05 | 100 | |
| | | | | | | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 750,305,412 | 711,826,419 | 94.87 | 100 | BADAN KESBANGPOLDAGRI NTB |
| | | | % | 0.1 | 0.12 | 120.00 | | <p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> | 60,009,800.00 | 57,729,800.00 | 96.20 | 100 | |
| | | | | | | | | <p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> | - | - | #DIV/0! | 100 | |
| | | | | | | | | <p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> | - | - | #DIV/0! | 100 | |
| | | | | | | | | <p>Pelaksanaan Tugas Paskibraka</p> | 690,295,612.00 | 654,096,619.00 | 94.76 | 100 | |
| | | Persentase Penanganan Potensi Konflik | % | 5.11 | 5.37 | 105.09 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA | 707,740,000 | 687,460,900 | 99.54 | 100 | BADAN KESBANGPOLDAGRI NTB |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|-------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 542,600,000.00 | 540,100,000.00 | 99.54 | 100 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 136,035,000.00 | 122,080,900.00 | 89.74 | 100 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 29,105,000.00 | 25,280,000.00 | 86.86 | 100 | |
| JUMLAH SASARAN 1 | | | | | | | | 5,368,605,412 | 5,287,253,159 | 98.48 | 100 | |
| 2 | Meningkatya Kesadaran Politik Masyarakat | | % | 68.67 | 66.06 | 96.20 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 1,767,314,000 | 1,721,929,000 | 97.43 | 100 | BADAN KESBANGPOLDAGRI NTB |
| | | | | | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1,643,879,000.00 | 1,599,819,000.00 | 97.32 | 100 | |
| | | Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Politik | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 67,050,000.00 | 66,680,000.00 | 99.45 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|------|------|--|--|--------------------|--------------------|-------|-----|--|
| | | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 56,385,000.00 | 55,430,000.00 | 98.31 | 100 | | |
| | | | % | 0.75 | 0.79 | 105.33 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 160,007,024,455 | 158,545,528,010 | 99.09 | 100 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik | 159,078,832,455.00 | 157,730,993,373.00 | 99.15 | 100 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik | 748,012,000.00 | 662,055,807.00 | 88.51 | 100 | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik | 180,180,000.00 | 152,478,830.00 | 84.63 | 100 | |
| JUMLAH SASARAN 2 | | | | | | | 161,774,338,455 | 160,267,457,010 | 99.07 | 100 | | |
| JUMLAH SASARAN 1 + 2 | | | | | | | 167,142,943,867 | 165,554,710,169 | 99.05 | 100 | | |

SASARAN II

MENINGKATNYA MASYARAKAT SADAR POLITIK

Meningkatnya kesadaran masyarakat politik merupakan indikator sasaran Pemerintah Daerah, tetapi karena Bakesbangpoldagri merupakan satu-satunya Perangkat Daerah pengampuh, maka sasaran beserta indikator sasaran tersebut diturunkan langsung Perangkat Daerah pengampuh dalam hal ini yaitu Bakesbangpoldagri.

Penetapan Sasaran Meningkatnya masyarakat sadar politik merupakan satu harapan besar yang ingin dicapai Bakesbangpoldagri untuk menunjukkan bahwa masyarakat NTB semakin sadar pentingnya berperan serta membangun daerah dalam bentuk berserikat melalui wadah organisasi. Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar kesadaran masyarakat NTB memanfaatkan atau menggunakan fasilitas / organisasi-organisasi yang ada untuk menyalurkan/ menyampaikan gagasan/ aspirasinya dalam rangka berkontribusi membangun bangsa atau wilayahnya akan terlihat pada pencapaian indikator dari sasaran tersebut yaitu **Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah** dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{masyarakat yang mendapat pendidikan politik}}{\Sigma \text{masyarakat yang memiliki hak pilih pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah}} \times 100\%$$

Σ masyarakat yang memiliki hak pilih pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi Capaian (%) | Persentase Tingkat Capaian |
|--|------------|-----------------------|----------------------------|
| Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah | 0,75 | 0,83 | 110 |

Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah

Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah salah satu indikator yang menggambarkan tentang kepedulian atau ikut sertanya masyarakat membantu Pemerintah mengawal pembangunan di semua sector melalui wadah organisasi, baik, organisasi politik, organisasi profesi, Organisasi Kepemudaan, maupun organisasi

kemasyarakatan, dll. Dari Tabel diatas dijelaskan bahwa dari target 0,75 % realisasi nya 0,83 % sehingga capaian target mencapai 110 %. Angka tersebut diperoleh berdasarkan Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan poltik melalui sosialisasi maupun kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai politik sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 2.637 orang dibagi dengan Jumlah DPT Wilayah dengan tingkat Partisipasi Rendah yaitu Kota Mataram sebanyak 315.549 orang.

Tabel.3.11 Data Partisipasi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

DATA JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

| NO | URAIAN | | RINCIAN | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | LOMBOK BARAT | LOMBOK TENGAH | LOMBOK TIMUR | SUMBAWA | DOMPU | BIMA | SUMBAWA BARAT | LOMBOK UTARA | KOTA MATARAM | KOTA BIMA | JUMLAH AKHIR | PERSENTASE DALAM KELOMPOK | PERSENTASE DALAM DPT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | Lk | 255,010 | 375,070 | 480,674 | 181,529 | 91,513 | 185,225 | 50,130 | 90,633 | 152,467 | 54,547 | 1,916,798 | | 48.92 |
| | | Pr | 262,809 | 397,336 | 504,711 | 186,458 | 92,947 | 191,300 | 52,292 | 92,758 | 163,082 | 57,800 | 2,001,493 | | 51.08 |
| | | Jml | 517,819 | 772,406 | 985,385 | 367,987 | 184,460 | 376,525 | 102,422 | 183,391 | 315,549 | 112,347 | 3,918,291 | - | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap | Lk | 218,567 | 298,643 | 343,287 | 147,754 | 77,978 | 151,693 | 44,089 | 77,096 | 125,521 | 46,900 | 1,531,528 | 47.12 | 39.09 |
| | | Pr | 234,706 | 343,696 | 437,028 | 147,291 | 79,789 | 161,468 | 44,573 | 81,432 | 138,126 | 50,790 | 1,718,899 | 52.88 | 43.87 |
| | | Jml | 453,273 | 642,339 | 780,315 | 295,045 | 157,767 | 313,161 | 88,662 | 158,528 | 263,647 | 97,690 | 3,250,427 | 100.00 | 82.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) | Lk | 594 | 711 | 768 | 1,447 | 491 | 759 | 1,114 | 270 | 1,226 | 783 | 8,163 | 55.63 | 0.21 |
| | | Pr | 478 | 507 | 803 | 1,072 | 335 | 622 | 534 | 294 | 1,371 | 494 | 6,510 | 44.37 | 0.17 |
| | | Jml | 1,072 | 1,218 | 1,571 | 2,519 | 826 | 1,381 | 1,648 | 564 | 2,597 | 1,277 | 14,673 | 100.00 | 0.37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) | Lk | 2,924 | 4,796 | 6,306 | 2,701 | 3,263 | 2,164 | 1,404 | 599 | 1,880 | 1,018 | 27,055 | 45.46 | 0.69 |
| | | Pr | 3,958 | 7,233 | 7,577 | 2,951 | 3,316 | 2,166 | 1,158 | 923 | 2,182 | 993 | 32,457 | 54.54 | 0.83 |
| | | Jml | 6,882 | 12,029 | 13,883 | 5,652 | 6,579 | 4,330 | 2,562 | 1,522 | 4,062 | 2,011 | 59,512 | 100.00 | 1.52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | jumlah pengguna hak pilih | Lk | 222,085 | 304,150 | 350,361 | 151,902 | 81,732 | 154,616 | 46,607 | 77,965 | 128,627 | 48,701 | 1,566,746 | 47.13 | 39.99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|-------|
| | | Pr | 239,142 | 351,436 | 445,408 | 151,314 | 83,440 | 164,256 | 46,265 | 82,649 | 141,679 | | 1,757,866 | 52.87 | 44.86 |
| | | Jml | 461,227 | 655,586 | 795,769 | 303,216 | 165,172 | 318,872 | 92,872 | 160,614 | 270,306 | 48,701 | 3,324,612 | 100.00 | 84.85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT | | 592,225 | 789,364 | 1,006,908 | 376,079 | 188,488 | 384,824 | 104,670 | 187,371 | 322,459 | 114,725 | 4,067,113 | | |
| 7 | Jumlah Surat Suara yang digunakan | | 461,227 | 655,586 | 795,769 | 303,216 | 165,172 | 318,872 | 92,872 | 160,614 | 270,306 | 100,978 | 3,159,440 | 77.68 | |
| 8 | Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak/keliru coblos) | | 648 | 897 | 1,004 | 311 | 152 | 259 | 93 | 140 | 291 | 111 | 3,906 | 0.10 | |
| 9 | Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan | | 67,350 | 132,881 | 210,135 | 72,552 | 23,164 | 65,693 | 11,705 | 26,617 | 51,862 | 13,636 | 675,595 | 16.61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Jumlah Pemilih Disabilitas | Lk | 669 | 608 | 1,559 | 688 | 647 | 792 | 222 | 258 | 340 | 488 | 6,271 | 42.43 | 0.16 |
| | | Pr | 809 | 711 | 2,390 | 891 | 655 | 1,153 | 316 | 342 | 488 | 753 | 8,508 | 57.57 | 0.22 |
| | | Jml | 1,478 | 1,319 | 3,949 | 1,579 | 1,302 | 1,945 | 538 | 600 | 828 | 1,241 | 14,779 | 100.00 | 0.38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik = **Jumlah pengguna hak pilih/Jumlah Pemilih dalam daftar Pemilih tetap X 100** = **84.85**

HASIL PILPRES 2024

| NO | URAIAN | RINCIAN |
|----|--------|---------|
|----|--------|---------|

| I | DATA RINCIAN PEMILIHAN SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | | LOMBOK BARAT | LOMBOK TENGAH | LOMBOK TIMUR | SUMBAWA | DOMPU | BIMA | SUMBAWA BARAT | LOMBOK UTARA | KOTA MATARAM | KOTA BIMA | JUMLAH AKHIR | PERSENTASE (%) DALAM KELOMPOK | PERSENTASE DALAM DPT |
|--------|--|---|-----------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | H. ANIES RASYID BASWEDAN, PH.D - DR (HC). H.A. MUHAIMIN ISKANDAR | | 138,850 | 174,477 | 166,481 | 66,727 | 35,081 | 81,865 | 27,846 | 38,785 | 87,541 | 32,886 | 850,539 | 26.20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA | | 277,940 | 430,129 | 535,445 | 206,532 | 120,702 | 218,485 | 56,756 | 100,827 | 145,580 | 62,447 | 2,154,843 | 66.37 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | H. GANJAR PRANOWO, SH. M.I.P - Prof. Dr. H.M. MAHFUD MD. | | 28,944 | 36,608 | 77,519 | 24,032 | 6,314 | 10,828 | 5,943 | 16,103 | 30,995 | 3,820 | 241,106 | 7.43 | |
| JUMLAH | | | 445,734 | 641,214 | 779,445 | 297,291 | 162,097 | 311,178 | 90,545 | 155,715 | 264,116 | 99,153 | 3,246,488 | 100 | |

JUMLAH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

=

82.85

| NO | URAIAN | | RINCIAN | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| I | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | | LOMBOK BARAT | LOMBOK TENGAH | LOMBOK TIMUR | SUMBAWA | DOMPU | BIMA | SUMBAWA BARAT | LOMBOK UTARA | KOTA MATARAM | KOTA BIMA | JUMLAH AKHIR | PERSENTASE DALAM KELOMPOK | PERSENTASE DALAM DPT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | JUMLAH SELURUH SURAT SUARA SAH | | 445,734 | 641,214 | 779,445 | 297,291 | 162,097 | 311,178 | 90,545 | 155,715 | 264,116 | 99,153 | 3,246,488 | 97.78 | |
| 2 | JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH | | 15,493 | 14,372 | 16,324 | 5,925 | 3,075 | 7,694 | 2,327 | 4,899 | 1,825 | 1,825 | 73,759 | 2.22 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH | | 461,227 | 655,586 | 795,769 | 303,216 | 165,172 | 318,872 | 92,872 | 160,614 | 265,941 | 100,978 | 3,320,247 | 100 | - |
| | | | 13.89 | 19.75 | 23.97 | 9.13 | 4.97 | 9.60 | 2.80 | 4.84 | 8.01 | 3.04 | | | |

| NO | URAIAN | | LOMBOK | SUMBAWA | TOTAL | PERSENTASE |
|----|--------------------------------|---|-----------|---------|-----------|------------|
| 1 | JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH | = | 2,339,137 | 981,110 | 3,320,247 | 100 |
| 2 | SUARA SAH | = | 2,286,224 | 960,264 | 3,246,488 | 98 |
| 3 | SUARA TIDAK SAH | = | 52,913 | 20,846 | 73,759 | 2 |
| 4 | PERSENTASE SUARA SAH | | 97.74 | 97.88 | 97.78 | |
| 5 | PERSENTASE SUARA TIDAK SAH | | 2.26 | 2.17 | 2.22 | |
| | | | 100 | 100 | | |

1. Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)/ LSM Tahun 2024.

Parpol yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui Pemilu (UU No. 31 thn 2002 tentang Parpol).

Sedangkan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang).

Tabel. 3. 12 Rekap Jumlah Pengurus Parpol yang ada di Provinsi NTB Tahun 2024

| NO | PARTAI | PENGURUS PEREMPUAN | PENGURUS LAKI-LAKI | JUMLAH PENGURUS |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 9 | 79 | 88 |
| 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 55 | 114 | 169 |
| 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 113 | 328 | 441 |
| 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 105 | 280 | 385 |
| 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 80 | 203 | 283 |
| 6 | Partai Golkar | 273 | 572 | 845 |
| 7 | Partai Nasional Demokrat | 102 | 199 | 301 |
| 8 | Partai Demokrat | 790 | 411 | 1201 |
| 9 | Partai Bulan Bintang | 47 | 94 | 141 |
| 10 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 103 | 215 | 318 |
| 11 | Partai Amanat Nasional | | | 175 |
| 12. | Partai Berkarya | | | 34 |
| | TOTAL | | | 4.381 |

Sumber : Bakesbangpoldagri NTB

2. Kepengurusan Ormas dan Parpol.

Berdasarkan data yang dihimpun dari 12 (dua belas) Parpol dan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas/LSM) baik yang melaporkan keberadaannya ataupun yang mendapat fasilitasi dari Bakesbangpoldagri dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Kementerian Dalam Negeri maupun yang berstatus Badan Hukum yang proses penerbitannya melalui Kementerian Hukum dan HAM diperoleh data bahwa terdapat 14.298 orang masyarakat NTB yang terlibat langsung dalam Kepengurusan Organisasi atau sebesar 0,64% dari 2,250.759 jiwa penduduk NTB usia 25 – 59 tahun . Kondisi capaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 0,61% atau sebanyak 18.006 orang. Hal ini dikarenakan pelaksanaan amanat Perda No. 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang membatasi mobilitas dan berkumpul . sehingga kegiatan yang diharapkan dapat menggenjot atau menaikkan minat masyarakat untuk berorganisasi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis tidak dapat dilakukan. (Data Ormas terlampir)

Beberapa Hal yang mendukung Pencapaian Indikator Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah yaitu :

a. Efektifnya Pemanfaatan Sumber Daya

secara capaian, indikator Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah melebihi target dengan capaian target 110 % merupakan capaian yang luar biasa. Dengan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya yang terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk menghasilkan kinerja yang optimal, sumber daya dimaksud melalui:

- 1) Saling keterkaitan dan saling mendukungnya antara indikator, baik antara indikator eselon II dengan eselon 3, demikian juga antara eselon III dengan eselon IV dibawahnya, sehingga indikator outcome Perangkat Daerah (Eselon II) terdongkrak dengan baik.

Indikator-indikator Eselon III dimaksud yaitu :

- Persentase Keterlibatan masyarakat dalam politik;
- Persentase Ormas yang aktif;

- 2) Saling bersinergi dan efektifnya program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang Teknis, yang walaupun dilihat dari sisi anggaran karena pandemic Covid-19 sangat minim dan tidak mendukung, tetapi karena substansi kegiatan bisa saling mengisi satu sama lain maka capaian outcome dari masing-masing program tidak berpengaruh secara signifikan dengan keterbatasan capaian output.

Beberapa Program dan kegiatan yang dimaksud yaitu :

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan indikator Persentase Keterlibatan masyarakat dalam politik.

Pelaksanaan Kegiatannya berupa hibah kepada lembaga dan partai politik peserta Pemilihan Umum, Koordinasi berupa Bimtek Bantuan keuangan Parpol, Sosialisasi Pendidikan Politik, dan Rapat Koordinasi bersama Kesbangpoldagri kab/kota se NTB;

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator nya Persentase Ormas yang Aktif. Pelaksanaan Kebijakan berupa hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Koordinasi berupa Rapat Koordinasi pengawasan Ormas dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Efektifnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehingga dapat mendeteksi tentang aktivitas dan keberadaan Ormas,
- c. Dukungan Ormas/LSM sebagai mitra binaan Bakesbangpoldagri yang membantu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui keikutsertaan bergabung dan berserikat dalam wadah organisasi.
- d. Dukungan Organisasi politik seperti Parpol sebagai mitra Bakesbangpoldagri yang merupakan organisasi dengan partisipan yang besar dan berpengaruh.
- e. Efektifnya Fungsi Koordinasi
 - Efektifnya pelaksanaan Koordinasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
 - Efektifnya pelaksanaan fungsi koordinasi melalui pembinaan secara langsung kepada masing-masing Ormas/LSM ataupun berkoordinasi langsung dengan pengurus=pengurus Parpol, dll.

Beberapa alternative lain lain yang telah dilakukan oleh Bakesbangpoldagri untuk meningkatkan indikator persentase keterlibatan masyarakat dalam politik adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan spirit/dorongan kepada setiap Ormas/LSM yang mengajukan permohonan mendaftarkan Lembaga diri ke Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa menjadi inspirasi bagi yang lain
- b) Menghimbau kepada Ormas/LSM yang mendapat bantuan hibah dari pemerintah untuk senantiasa aktif bersosialisasi ke masyarakat

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Meningkatnya masyarakat sadar politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 161.774.338.455 (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh puluh Empat juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat ratus Lima Puluh lima rupiah)) dan terealisasi sebesar Rp. 160.267.457.010,- (Seratus Enam Puluh Milyar Dua ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sepuluh Rupiah).

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya Meningkatnya masyarakat sadar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya masyarakat sadar politik

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya masyarakat sadar politik | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah | 99 % | 99 % | 0,1 % |

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Renstra, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target ($>100\%$) yaitu Persentase Keberhasilan Deteksi Dini & Cegah Dini Potensi Konflik Sosial dengan target 100 % dan realisasi 100 % dan capaian target 100 % dan Persentase masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah dengan target 0,75 % dan realisasi 0,83 % dengan capaian target 110 %.
2. Rata-rata capaian indikator kinerja 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 sebesar 105 %, dengan kata lain capaian indikator kinerja dikategorikan **sangat baik** ($\geq 85\%$).
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis dan 2 (Dua) indikator kinerja adalah sebesar Rp. **174.992.246.483**, direalisasikan sebesar **Rp. 173.037.820.936** (98 %) dengan realisasi fisik 100%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran 2 % atau secara absolute sebesar Rp. 1.954.425.547,-.
4. Kasus konflik sosial di Provinsi NTB bertambah 2 kasus dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 terdapat 6 (enam) kasus konflik sosial yang terjadi
5. Jumlah kasus potensi konflik tahun 2024 di NTB masih tinggi dan didominasi oleh kasus kriminal dan unjuk rasa


4.2. Saran

1. Peningkatan peran dan pemberdayaan forum-forum yang menjadi mitra Bakesbangpoldagri sangat urgen untuk dilakukan guna ketepatan dan kecepatan pengambilan kebijakan, serta deteksi dini dan cegah dini terhadap isu-isu yang menjadi potensi konflik di kalangan masyarakat.
2. Koordinasi yang intensif seluruh stakeholder dan pembinaan serta mediasi kepada warga kampung yang berkonflik agar tetap intensif dilakukan serta didukung dengan pendanaan yang memadai.
3. Duplikasi lokus Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Desa Bersinar) supaya lebih ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah Desa/kelurahan maupun substansi pendekatannya dan keberlanjutan pendanaannya. Program

Desa/kel Bersinar ini penting disamping menyelamatkan generasi bangsa juga berkontribusi menekan konflik sosial dari sisi kriminal.

4. Peningkatan Idiologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan masyarakat supaya lebih ditingkatkan lagi, baik volume maupun sasarannya, agar dapat mengedukasi masyarakat supaya tidak mudah terpapar paham-paham yang bertentangan dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Edukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik melalui wadah organisasi sangat penting dilakukan secara berkelanjutan.
6. Pemantapan sosialisasi hidup berdemokrasi dan penggunaan hak pilih supaya tetap dilakukan dan lebih intensif lagi.

KEPALA BADAN BAKESBANGPOLDAGRIDAGRI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



RUSLAN ABDUL GANI, SH, MH.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651231 199303 1 135